

WARTA Sertifikasi

Edisi 03 - Februari 2020

Putusan Mahkamah Konstitusi
tentang Jaminan Fidusia

**Perusahaan
Pembiayaan
Harus Tingkatkan
Tata Kelola &
Manajemen Risiko**



DAFTARKAN SEGERA
Ujian Sertifikasi Penagihan
Offline Tertulis & Manajerial
di Yogyakarta, 19 Maret 2020 &
Bali, 17 April 2020



VISI

Menjadi Lembaga Sertifikasi Profesi bidang pembiayaan yang unggul dalam upaya mendukung industri pembiayaan yang sehat dan kuat.



MISI

- Menyediakan Skema Sertifikasi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan di industri pembiayaan.
- Menjalankan Sertifikasi dan Uji Kompetensi secara tidak berpihak.

TUJUAN SERTIFIKASI

- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan.
- Meningkatkan pemahaman akan manfaat dari produk dan jasa perusahaan pembiayaan di masyarakat.
- Ikut serta dalam meningkatkan peran industri pembiayaan dalam pembangunan.

MANFAAT SERTIFIKASI

Manfaat bagi pemegang sertifikat :

- Meningkatkan kompetensi.
- Meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan tugas & tanggung jawabnya.
- Pengembangan diri untuk karir yang lebih baik dalam industri.

Manfaat bagi perusahaan dan industri pembiayaan :

- Salah satu alat ukur penting dalam proses rekrutmen dan penempatan karyawan.
- Kontribusi positif dari peningkatan kompetensi karyawan.
- Industri pembiayaan menjadi lebih baik, sehat, dan semakin maju.

Redaksional

Pemimpin Umum:
Andryan Harris

Redaktur Pelaksana:
Dwi Reza Pahlevi

Sekretaris Redaksi:
Dwi Reza Pahlevi, Cindy Olivia

Kantor Redaksi

Kota Kasablanka (EightyEight@Kasablanka)
Tower A, Lantai 7, Unit C Jl. Casablanca Kav. 88.

Jakarta Selatan

Telp : 021 2982 0180

Email : info@sppi.co.id

Sambutan Wakil Ketua Dewan Pengarah LSPPI

“Sertifikasi yang diwajibkan oleh POJK 35/2108 ini bukanlah sekedar formalitas belaka, namun merupakan upaya serius untuk meningkatkan martabat dan kualitas SDM industri pembiayaan, menghadapi persaingan global di masa mendatang.

Salam Kompeten !

Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia dinilai oleh banyak kalangan berpotensi mengganggu industri jasa keuangan, mulai dari pembiayaan, perbankan, pergadaian, hingga lembaga keuangan mikro. Tidak hanya sampai disitu, bahkan disinyalir dapat menjadi faktor negatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Penafsiran yang keliru dan tidak bertanggungjawab oleh sebagian LSM sempat mewarnai media massa selama beberapa minggu. Namun Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), sebagai wadah satu-satunya perusahaan pembiayaan di Indonesia, tidak tinggal diam. Dengan berbagai cara, APPI berjuang untuk meluruskan pemahaman tentang Putusan MK tersebut.

Wawancara

di radio, televisi, seminar di majalah terkenal, seminar di kampus-kampus, kampanye melalui IG APPI, dan seterusnya, menjadi bukti nyata bahwa APPI yang dinahkodai oleh Suwandi Wiratno berusaha membela industrinya yang saat ini mempekerjakan lebih dari 225.000 karyawan.

Kasus eksekusi kendaraan yang menjadi pemicu Putusan MK ini memberikan pelajaran yang sangat mahal dan berharga bagi kita semua, betapa pentingnya pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Itulah sebabnya, APPI melalui LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI) berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan, dimulai dari manajemen puncak perusahaan pembiayaan hingga ke pegawai di tingkat operasional seperti tenaga penagihan. Sertifikasi yang diwajibkan oleh POJK 35/2108 ini bukanlah sekedar formalitas belaka, namun merupakan upaya serius untuk meningkatkan martabat dan kualitas SDM industri pembiayaan, menghadapi persaingan global di masa mendatang.

Sigit Sembodo

Wakil Ketua Dewan Pengarah
LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI)





Tahun 2020 ini terdapat kurang lebih 49.000 pemegang sertifikat kompetensi Dasar Manajerial dan Profesi Penagihan yang akan jatuh tempo dan harus diperpanjang kembali melalui proses re-sertifikasi.

Salam Kompeten !

Dalam sajian utama kami terkait dengan Putusan Mahkamah Industri No.18/PUU-XVII/2019 tentang Jaminan Fidusia, Bapak Bambang W. Budiawan selaku Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B OJK menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan mesti meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko pembiayaan dengan lebih baik.

Sejalan dengan hal tersebut, LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI) terus berusaha sekuat tenaga untuk turut serta dalam mengembangkan budaya kepatuhan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan di industri pembiayaan khususnya melalui kewajiban sertifikasi seperti di atur dalam POJK 35/2018 guna meningkatkan kompetensi SDM di industri pembiayaan.

Tahun 2020 ini terdapat kurang lebih 49.000 pemegang sertifikat kompetensi Dasar Manajerial dan Profesi Penagihan yang akan jatuh tempo dan harus diperpanjang kembali melalui proses re-sertifikasi. Untuk membantu percepatan perusahaan pembiayaan melakukan re-sertifikasi karyawannya, LSPPI membuka program sertifikasi penagihan *inhouse*, penyediaan sarana prasarana ujian online melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di Yogyakarta dan Bandung dan akan hadir untuk mengadakan ujian sertifikasi di 5 kota yaitu Yogyakarta, Bali, Makassar, Palembang dan Banjarmasin.

Andryan Harris

Direktur

LSP Pembiayaan Indonesia (LSPPI)



Sajian Utama **6**

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan Harus Tingkatkan Tata Kelola & Manajemen Risiko

Usai terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada 6 Januari 2020, beragam komentar bermunculan.

9 Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

10 **AGENDA** SERTIFIKASI

12 **Kalender Sertifikasi 2020**

Bulan	Event
JANUARI	1. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
FEBRUARI	2. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
MARET	3. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
APRIL	4. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
MAY	5. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
JUNI	6. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
JULI	7. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
AGUSTUS	8. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
SEPTEMBER	9. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
OKTOBER	10. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
NOVEMBER	11. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta
DESEMBER	12. Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta

13



Ujian Online Sertifikasi Profesi Penagihan Lebih PRAKTIS, FLEKSIBEL dan EFISIEN

14 Tanya Jawab

16 Ketentuan Pengumpulan Poin Penyegaran

15 Ujian Online LSPPI Hadir di Kota Bandung & Yogyakarta



17 Kegiatan Ujian Sertifikasi

19 Peserta Sertifikasi Terbaik



Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Jaminan Fidusia Perusahaan Pembiayaan Harus Tingkatkan Tata Kelola & Manajemen Risiko

Usai terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada 6 Januari 2020, beragam komentar bermunculan.

Putusan MK yang hanya memaknai pasal 15 ayat 2 dan 3 dalam undang-undang Jaminan Fidusia telah menimbulkan kesalahan pemahaman yang menyudutkan perusahaan pembiayaan sebagai kreditor. Alih-alih memberikan perlindungan kepada konsumen, putusan ini justru mengancam keberlangsungan industri pembiayaan.

Kabar yang tersiar tersebut membuat Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) angkat bicara. Menurut Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, simpang siur berita mengenai putusan MK ini diprediksi akan membuat meningkatnya tindakan

wanprestasi oleh debitur.

Debitur nakal akan menafsirkan putusan itu secara berbeda sehingga memudahkan mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan pembiayaan. Namun, di satu sisi, Suwandi berharap, putusan MK tersebut tidak berpotensi mengganggu laju pertumbuhan perusahaan pembiayaan dan meningkatkan angka NPF (*Non-Performing Financing*).

“Kita akan terus berjuang. Kami bukan mau balik motor atau mobil. Kendaraan kami lelang itu untuk memperkecil kerugian kami. Dan kami yakin, kami institusi yang diatur dan diawasi OJK. Kami dapat izin juga susah,” tuturnya.

Jika diamati, lanjut Suwandi, keputusan MK itu pada dasarnya tidak membatalkan UU Jaminan Fidusia terkait hak eksekutorial penerima fidusia pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3.

Eksekusi dapat dilakukan sepanjang debitur terbukti wanprestasi dengan kelengkapan dokumen yang dapat ditunjukkan oleh pihak kreditur. MK menginginkan adanya perjanjian antara kreditur dan debitur terkait klausul wanprestasi atau cidera janji pada awal akad kredit.

Padahal, menurut Suwandi, hampir semua klausul itu disertakan dalam perjanjian kredit oleh perusahaan pembiayaan. Adapun, jika debitur wanprestasi dan sukarela menyerahkan objek fidusia, maka perusahaan pembiayaan boleh melakukan eksekusi.

Suwandi menambahkan, di lapangan, *collection* kerap menghadapi empat kasus penarikan kendaraan bermotor. *Pertama*, debitur dan objek fidusianya ada, sehingga eksekusi dan komunikasi mudah dilakukan.

Kedua, debitur ada, tapi objek fidusianya tidak ada. Pada kasus ini biasanya kendaraan telah dijual, digadaikan, atau dipindahtangankan.

Ketiga, debitur tidak ada, objek fidusianya ada.

Biasanya, debitur melarikan diri karena tidak sanggup membayar angsuran. *Keempat*, debitur tidak ada dan objek fidusianya juga tidak ada.



Kasus yang terakhir ini termasuk tindakan pencurian, dan pelakunya melarikan diri.

Di kesempatan yang berbeda, Bambang W. Budiawan, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) 2B Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, guna mengurangi risiko menjamurnya debitur nakal yang memanfaatkan putusan ini, perusahaan pembiayaan mesti meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko pembiayaan dengan lebih baik.

Industri pembiayaan, katanya, harus lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan MK terkait dengan penyitaan jaminan fidusia tersebut. "Perbaikan berkelanjutan penting dilakukan untuk merespons dinamika yang berkaitan dengan industri jasa keuangan," jelasnya.

Oleh karena itu, untuk menurunkan potensi pembiayaan bermasalah, perusahaan pembiayaan harus meningkatkan proses penyaluran kredit dengan memanfaatkan SLIK, sistem Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), *monitoring* calon debitur untuk memitigasi risiko di kemudian hari. Dengan prinsip kehati-hatian yang diperketat, ruang gerak debitur yang berpotensi macet, dan debitur nakal dapat dibatasi.

"Untuk mempersempit ruang gerak debitur nakal yang mengganggu bisnis ini, obat yang paling mujarab ialah *screening* segmen *market* yang menjadi keahlian dia, termasuk data id debitur. Jangan sampai *double identity*, proses *underwriting*, *monitoring*, dan yang paling penting perjanjiannya semakin disempurnakan, sehingga memberikan proteksi bagi penyedia jasa pembiayaan itu sendiri. Jangan sampai dia punya 20% DP, sedangkan 80%-nya tidak balik," tutur Bambang.

Demikian halnya dengan pegadaian objek fidusia. Pengalihan berkali-kali atas barang jaminan menyebabkan si pengguna terakhir terkena dampak penarikan oleh eksekutor. Oleh karena itu, lanjutnya, perusahaan pembiayaan harus berkoordinasi dengan penegak hukum agar debitur nakal yang dengan sengaja tidak membayar hutang, dan menggadaikan barang

jaminan dapat dikenai hukuman pidana sesuai aturan undang-undang jaminan fidusia agar memberikan efek jera.

Bambang menyatakan, putusan MK itu bukan berarti membuat perusahaan pembiayaan tidak bisa melakukan eksekusi. Sepanjang debitur tersebut terbukti wanprestasi dan rela menyerahkan objek fidusia, maka tenaga penagih dapat melakukan eksekusi.

Namun, jika kedua syarat itu tidak terpenuhi, perusahaan pembiayaan mesti melewati proses pengadilan. "Jadi jaminan fidusia itu sebenarnya tidak batal, tapi ada syarat yang mesti dipertegas di sana," ujarnya.

Bambang menyebutkan, OJK telah menerbitkan aturan terkait perjanjian antara debitur dan kreditur pada POJK 35/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Di dalam aturan itu, lanjutnya, perusahaan pembiayaan harus memastikan dicantumkan kontrak perjanjian mengenai fasilitas pembiayaan, hak kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan mengenai kesepakatan cidera janji dan konsekuensi yang harus dihadapi debitur.

Pada dasarnya, perusahaan pembiayaan mesti melakukan langkah *first way out* dengan cara *reminding* atau memberikan teguran kepada debitur yang menunggak pembayaran. Pelaksanaan eksekusi jaminan adalah langkah terakhir yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk mengurangi kerugian yang timbul akibat tunggakan angsuran.

Saat ini pihaknya tengah berkoordinasi secara intensif untuk menyikapi putusan MK dengan instansi pemerintah, seperti Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, APPI, dan pengawas perbankan agar tidak mengganggu iklim usaha industri pembiayaan.

Putusan ini, menurut Bambang memberikan efek domino terhadap industri keuangan. Pasalnya, pendanaan perusahaan pembiayaan terbesar berasal dari perbankan,



... guna mengurangi risiko menjamurnya debitur nakal yang memanfaatkan putusan ini, perusahaan pembiayaan mesti meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko pembiayaan dengan lebih baik.

Bambang W. Budiawan

*Kepala Departemen Pengawasan Industri
Keuangan Non Bank (IKNB) 2B Otoritas Jasa
Keuangan (OJK)*

sisanya obligasi, *Medium Term Notes* (MTN), dan *offshore loan*.

Bambang menganjurkan perusahaan pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu segmen pembiayaan saja, seperti halnya otomotif. Jika portofolio pembiayaan menyebar pada segmen lain, maka risiko kredit tidak terkonsentrasi pada satu segmen. (*)

Fasilitas Menu Pengunduran Diri & Verifikasi Pemegang Sertifikat

TANPA SURAT REFERENSI

DENGAN SURAT REFERENSI



- Sistem Informasi LSPPI memfasilitasi perusahaan dengan menu referensi pengunduran diri karyawan nya yang sudah bersertifikasi yaitu dengan pilihan "Dengan Surat Referensi (DSR)" atau "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Bila pegawai perusahaan tersebut berhenti baik - baik dan tidak bermasalah, maka perusahaan dapat melepaskan keterikatan data sertifikasi pegawai tersebut dengan status "Dengan Surat Referensi (DSR)".
- Sebaliknya bila pegawai tersebut terbukti melakukan tindakan fraud maka dapat dilepaskan dengan pilihan "Tanpa Surat Referensi (TSR)".
- Fasilitas ini adalah sarana komunikasi pasif antara perusahaan pembiayaan karena seluruh data pegawai yang masuk dalam DSR/TSR ini dapat dilihat oleh seluruh perusahaan pembiayaan lainnya.
- Perusahaan pembiayaan dapat memanfaatkan menu pengunduran diri ini sebaik mungkin dan berkomitmen untuk hanya merekrut pegawai yang sudah tersertifikasi dengan status DSR, sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membangun integritas karyawan dan akhirnya membuat industri pembiayaan semakin maju dan baik.

AGENDA

SERTIFIKASI

MARET 2020

12 JAKARTA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* Tertulis
- Sertifikasi Dasar Manajerial

14 BANDUNG

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Online* By SPPI

19 YOGYAKARTA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* Tertulis
- Sertifikasi Dasar Manajerial

20 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Komisaris
- Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Pengantar Bahasa Indonesia)

APRIL 2020

11 BANDUNG & YOGYAKARTA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Online* By SPPI

15 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Manajerial

16 JAKARTA

- Sertifikasi Dasar Komisaris
- Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Pengantar Bahasa Inggris)

23 SURABAYA

- Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* Tertulis
- Sertifikasi Dasar Manajerial

Keterangan :

1. Permintaan ujian *inhouse* (khusus Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* & Sertifikasi Dasar Manajerial) dapat menghubungi terlebih dahulu *Relationship Officer* LSPPI
2. Ujian Sertifikasi Profesi Penagihan *Online* tetap dapat dijadwalkan langsung setiap hari senin s/d sabtu
3. Jadwal sertifikasi setahun dapat dilihat dan diunduh di *website* www.sppi.co.id
4. Informasi lebih lanjut hubungi *Relationship Officer* LSPPI 021-2982 0180

JADWAL SEMINAR

POINT REFRESHMENT APPI

20 FEB
2020
JAKARTA

22 APR
2020
JAKARTA

26 JUN
2020
BALI



Melayani Pembiayaan
Motor & Mobil



PT. MEGA CENTRAL FINANCE

**Ribuan Nasabah Melakukan
Repeat Order Setiap
Minggu**

Terdaftar dan diawasi oleh:



Kalender Sertifikasi

23 Januari:
SDM di Jakarta

29 Januari:
SDK & SAP-
Indonesia di Jakarta

01 JANUARI

13 Februari:
SDM di Jakarta

27 Februari:
SDK & SAP-English
di Jakarta

02 FEBRUARI

12 Maret:
SPP Offline & SDM
di Jakarta

19 Maret:
SPP Offline & SDM
di Yogyakarta

20 Maret:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

03 MARET

15 April:
SDM di Jakarta

16 April:
SDK & SAP-English
di Jakarta

23 April:
SPP Offline & SDM
di Surabaya

04 APRIL

5 Mei:
SPP Offline di Jambi

14 Mei:
SDK &
SAP-Indonesia
di Jakarta

05 MEI

17 Juni:
SDM di Jakarta

25 Juni:
SPP Offline, SDM,
SDK, &
SAP-English
di Bali

06 JUNI

15 Juli:
SPP Offline & SDM
di Pontianak

23 Juli:
SDM di Jakarta

29 Juli:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

07 JULI

6 Agustus:
SPP Offline & SDM
di Medan

6 Agustus:
SDM di Jakarta

13 Agustus:
SPP Offline & SDM
di Semarang

27 Agustus:
SDK & SAP-English
di Jakarta

08 AGUSTUS

10 September:
SPP Offline & SDM
di Makassar

16 September:
SDM di Jakarta

17 September:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

23 September:
SPP Offline & SDM
di Banjarmasin

09 SEPTEMBER

14 Oktober:
SPP Offline & SDM
di Palembang

21 Oktober:
SDM di Jakarta

22 Oktober:
SDK & SAP-English
di Jakarta

10 OKTOBER

12 November:
SDM di Jakarta

13 November:
SDM-English
di Jakarta

18 November:
SDK & SAP-Indonesia
di Jakarta

11 NOVEMBER

3 Desember:
SDM di Jakarta

11 Desember:
SDK & SAP-English
di Tokyo

12 DESEMBER

RUTIN!!

Ujian Online by LSPPI setiap hari Sabtu di minggu ke 2 setiap bulan diadakan di Universitas Kristen Maranatha - Bandung & STIM YKPN - Yogyakarta yang bekerjasama dengan LSP Pembiayaan Indonesia.

Keterangan:

- SPP adalah Sertifikasi Profesi Penagihan
- SDM adalah Sertifikasi Dasar Manajerial
- SDK adalah Sertifikasi Dasar Komisaris
- SAP adalah Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

LSP PEMBIAYAAN INDONESIA GENCARKAN KERJASAMA DENGAN BEBERAPA LEMBAGA PENDIDIKAN

Kerjasama ini merupakan bukti bahwa LSPPI berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sumber daya manusia di industri pembiayaan.



Universitas Kristen Maranatha, Bandung



STIM YKPN, Yogyakarta



DAFTARKAN SEGERA SEBELUM TERLAMBAT

HOT NEWS



UJIAN SERTIFIKASI DI:

YOGYAKARTA

19 MARET 2020

- ☑ Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* Tertulis
- ☑ Sertifikasi Dasar Manajerial

BALI

17 APRIL 2020

- ☑ Sertifikasi Profesi Penagihan *Offline* Tertulis
- ☑ Sertifikasi Dasar Manajerial



Info lebih lanjut dapat menghubungi kami di 021-29820180 atau di email info@sppi.co.id

BELUM TERIMA HASIL UJIAN

Tanya :

Saya sudah mengikuti ujian akhir bulan lalu, namun sampai saat ini belum mendapatkan hasil ujian, sedangkan rekan saya yang mengikuti ujian bersamaan sudah mendapatkan hasil ujiannya.

Sanusi
Jambi

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya. Kemungkinan data Bapak (nomor handphone/alamat email) yang didaftarkan kedalam sistem SPPI tidak valid. Silahkan bapak hubungi HRD Pusat/PIC sertifikasi perusahaan bapak untuk dilakukan update data diri kemudian lakukan reset password untuk login ke dalam system SPPI untuk melihat nilainya. Red.

PENDAFTARAN PERPANJANGAN SERTIFIKASI

Tanya :

Sertifikasi saya akan habis pada 15 Juli 2020, apakah saya sudah bisa perpanjang sertifikasi di bulan Februari 2020 ?

Ani Sutedja
Surabaya

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk perpanjangan sertifikasi bisa dilakukan paling cepat H-90 dari tanggal jatuh tempo sertifikasi berakhir yaitu jatuh pada 16 April 2020. Red.

PENDAFTARAN UJIAN SERTIFIKASI *INHOUSE*

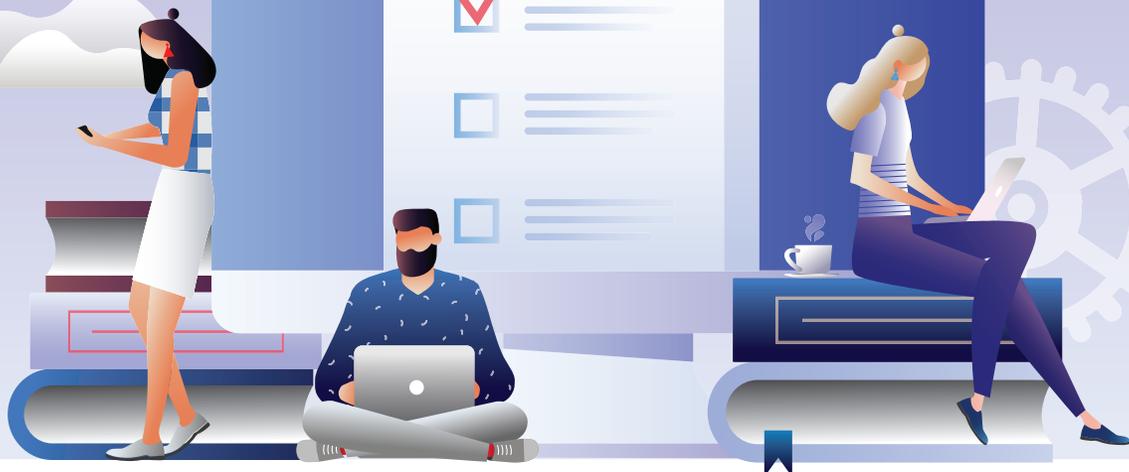
Tanya :

Di perusahaan saya ada sekitar 140 karyawan penagih yang belum mengikuti ujian sertifikasi penagihan, apakah bisa jika *request* untuk ujian sertifikasi *inhouse* di tempat kami sendiri?

Paulus Mahoni
Jakarta

Jawab :

Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak bisa menghubungi Relationship Officer kami untuk informasi lebih lanjut di 021-29820180. Red.



KINI UJIAN ONLINE LSPPI HADIR DI **KOTA BANDUNG & YOGYAKARTA**

- ✓ Ujian online ini merupakan kerjasama LSPPI dengan Universitas Kristen Maranatha Bandung & STIM YKPN Yogyakarta
- ✓ Diadakan 1 bulan sekali setiap hari Sabtu minggu kedua.
- ✓ Permintaan jadwal tambahan di luar jadwal diatas serta informasi mengenai pendaftaran dapat menghubungi Relationship Officer LSPPI di 021-29820180

Difasilitasi LSPPI bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan



Venue



Komputer



Pengawas

Ketentuan Pengumpulan Poin Penyegaran (*Refreshment Point*)

Sertifikasi Ahli Pembiayaan (Direksi)

Wajib memenuhi 10 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Sertifikasi Dasar Komisaris (Komisaris)

Wajib memenuhi 5 poin dalam waktu
1 tahun periode.

Penjelasan Umum :

1 Tahun periode adalah Januari s/d Desember.
Pengumpulan poin dimulai tahun berikutnya setelah tahun bersertifikat.

Contoh :

- Peserta bersertifikat pada Mei 2017
- Pengumpulan poin dimulai dari Januari 2018 - Desember 2018
- Jika belum terpenuhi, maka di periode kedua Januari 2019 - Desember 2019 wajib memenuhi kekurangan poin secara akumulasi (20 poin untuk Sertifikasi Ahli Pembiayaan dan 10 poin untuk Sertifikasi Dasar Komisaris)
- Jika masih belum terpenuhi total akumulasi kewajiban poin dalam dua periode tersebut, maka peserta **wajib mengikuti seminar dan ujian sertifikasi kembali.**

Metode Pengumpulan & Besar Nilai Poin adalah sebagai berikut:



Ikut serta dalam seminar/*workshop*/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Ikut serta dalam publik seminar/*workshop*/pelatihan/kursus bidang Industri keuangan yang diselenggarakan BUKAN oleh OJK dan atau APPI serta bukan diselenggarakan oleh internal/*group* perusahaan.



Menjadi pembicara/instruktur/pengajar dalam kegiatan seminar/*workshop*/pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh OJK dan atau APPI.



Menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain di bidang industri keuangan yang di publikasikan umum melalui media masa bukan media internal/*group*/asosiasi.



Ketentuan Umum :

- Keputusan LSPPI bersifat final.
- Bukti pengumpulan poin wajib dikirimkan ke email : point@sppi.co.id
- Bukti pengumpulan poin adalah sertifikat partisipasi, sertifikat pembicara, dan buku/karya tulis.
- Batas akhir menyerahkan bukti pengumpulan poin setiap periode, selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.
- Ketentuan ini berlaku efektif sejak 01 Januari 2018.



1



2



3

1. 6 November 2019, Jakarta, Inhouse Astra Group, Sertifikasi Profesi Penagihan
2. 14 November 2019, Jakarta, Sertifikasi Dasar Manajerial
3. 14 November 2019, Medan, Sertifikasi Dasar Manajerial
4. 16 November 2019, Jakarta, Inhouse OTO Group, Sertifikasi Dasar Manajerial
5. 21 November 2019, Jakarta, Sertifikasi Ahli Pembiayaan & Sertifikasi Dasar Komisaris
6. 29 November 2019, Jakarta, Sertifikasi Dasar Manajerial (English Class)



4



5



6



7



8



9



10



11

- 7. 4 Desember 2019, Jakarta, Sertifikasi Dasar Manajerial
- 8. 7 Desember 2019, Rancamaya, Inhouse OTO Group, Sertifikasi Dasar Manajerial
- 9. 13 Desember 2019, Jakarta, Inhouse IMFI, Sertifikasi Dasar Manajerial
- 10. 8 Januari 2020, Jakarta, Inhouse Adira, Sertifikasi Profesi Penagihan
- 11. 17 Januari 2020, Jakarta, Inhouse Buana Finance, Sertifikasi Dasar Manajerial
- 12. 18 Januari 2020, Rancamaya, Inhouse OTO Group, Sertifikasi Dasar Manajerial



12

Selamat

Atas Keberhasilan Pencapaian Nilai Tertinggi Ujian Sertifikasi

Bulan November 2019

Sertifikasi Dasar Manajerial



Muhammad Fahromi
Credit Manager
Adira Dinamika Multifinance



Indro Yulianto Dwi
Durable Branch Coordinator
Adira Dinamika Multifinance



Listyatmoyo Hariadi L.
Group Head Internal Audit
BRI Multifinance Indonesia



Bambang Hariyono
Cluster Collection Head
Adira Dinamika Multifinance



Basuki Tri Rahardjo
Head of Branch SSD
Adira Dinamika Multifinance



Heru Susanto
Credit Manager
Adira Dinamika Multifinance



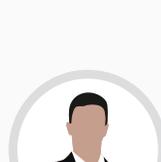
Fajar Apriliawan
Account Maintenance Officer
Toyota Astra Financial Services



Mansyur
Branch Account Solution Head Jember
BCA Finance



Gajali Rahman
A/R HEAD 1/2 ALL
Adira Dinamika Multifinance



Suhendrik
Remedial Officer All
Adira Dinamika Multifinance

Sertifikasi Profesi Penagihan



Anton
Information Technology Deputy
Department Head
Surya Artha Nusantara Finance



Julia Habinsaran
Risk Management & Compliance
Div. Head
Indomobil Finance Indonesia



Zaenal Abdullah
People Development
Div. Head
OTO Multiartha



Abdi Cahyadi
Branch Operation Head
BCA Finance



Arifin Sufyantoro
Deputy Collection
Div Head
OTO Multiartha



Budi Arifianto Wibisana
General Manager
Hino Finance Indonesia

Sertifikasi Profesi Penagihan



L. Rizal Hidayatullah
Problem Account Consultant Mataram
BCA Finance



Rudi Mustika Dharma
Field Collector
Dipo Star Finance



Dedi Kurniawan
Collector
Mega Finance



 **LSPPI**
LSP PEMBIAYAAN INDONESIA

GONG XI FA CAI

HAPPY
Chinese

NEW YEAR

